



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PERMEN-KP/2017
TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran serta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017, dan merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- (2) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I: Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018, serta Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018;
 - b. Lampiran II: Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018; dan
 - c. Lampiran III: Komponen Kegiatan Utama Tahun 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2018 merupakan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-863/MK.02/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit kerja eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan Rencana Kerja.
- (3) Pimpinan unit kerja eselon I wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Penyesuaian/perbaikan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PERMEN-KP/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2018

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja KKP) Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun keempat pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Renstra KKP Tahun 2015-2019), Visi KKP Tahun 2015-2019 adalah menjabarkan arahan Presiden bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa” yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Misi KKP adalah Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dilakukan berdasarkan *money follows* program prioritas.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2018 difokuskan pada:

1. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi;
 - b. penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran;

- c. penenggelaman kapal ikan asing ilegal;
 - d. penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
 - e. penguatan kerja sama regional maupun internasional; dan
 - f. penerapan *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.
2. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
- a. penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya);
 - b. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengawasan lainnya;
 - c. pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - e. mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan.

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJM Tahun 2015-2019 dan Renstra KKP Tahun 2015-2019. Pada tahun 2018 indikator kinerja yang akan dicapai oleh KKP adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2018
<i>I. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</i>		
1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	56
2.	Pertumbuhan Produk Domestik Broto Perikanan	11
<i>II. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>		
3.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	81
4.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	4
<i>III. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan</i>		
5.	Persentase pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (%)	60
6.	Persentase peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan (%)	62
7.	Produksi perikanan (juta ton):	33,53
	1. Perikanan Tangkap (juta ton):	9,45
	2. Perikanan Budidaya (juta ton):	24,08
	a. ikan	7,91
	b. rumput laut	16,17
8.	Produksi garam (Pugar dan Non-Pugar) (juta ton)	4,1
9.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,0
10.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	50,65
11.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan dan perikanan (Rp. miliar)	583,9
<i>IV. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Efektif</i>		
12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	7,8
<i>V. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan</i>		
13.	Efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan (%)	71
<i>VI. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif</i>		
14.	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (%)	90
15.	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	76

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2018
<i>VII. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian</i>		
16.	Indeks kompetensi dan integritas	80
<i>VIII. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses</i>		
17.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	65
<i>IX. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima</i>		
18.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	A
19.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3
<i>X. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel</i>		
20.	Nilai Kinerja Anggaran	Baik (86)
21	Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wajar

C. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan, akan dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program sebagai berikut:

1. Program pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.264.959.688.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. bantuan kapal perikanan yang terbangun (508 unit);
 - b. bantuan alat penangkapan ikan (1.702 paket);
 - c. bantuan mesin kapal perikanan <10 GT (1.000 unit);
 - d. bantuan premi asuransi nelayan (500.000 orang);
 - e. lanjutan pembangunan gedung sentra perikanan *National Fisheries Center* (NFC) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Muara Baru;
 - f. penataan kampung nelayan percontohan (6 lokasi);
 - g. kedai nelayan percontohan (3 lokasi);
 - h. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higenis (16 lokasi);
 - i. bengkel kapal perikanan percontohan (1 lokasi);
 - j. lanjutan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (4 lokasi);
 - k. TPI Perairan darat (4 lokasi).
2. Program pengelolaan perikanan budidaya sebesar Rp944.857.746.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:

- a. produksi benih ikan (200 juta ekor);
 - b. produksi induk unggul/calon induk unggul (1,2 juta ekor);
 - c. operasional budidaya *offshore* (3 unit);
 - d. produksi bibit rumput laut (20 paket);
 - e. penataan kawasan budidaya melalui pembangunan embung (1 kawasan) dan percontohan budidaya udang (9 kawasan);
 - f. *excavator* (50 unit), dan bantuan operasional Keramba Jaring Apung (KJA) (300 paket);
 - g. *bioflock* (300 unit);
 - h. bantuan sarana dan prasarana usaha budidaya untuk masyarakat/pembudidaya (750 kelompok), bantuan alih profesi penangkap benih lobster (650 paket), bantuan ikan hias (20 paket);
 - i. minapadi (500 hektar);
 - j. pakan mandiri: bahan baku (250 paket), mesin pakan (250 paket), pembangunan pabrik pakan (2 unit) serta bantuan pakan ikan (2.500 ton);
 - k. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (3 SKPT).
3. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebesar Rp785.003.713.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a. *ice flake machine* kapasitas 1,5 ton (60 unit);
 - b. *ice flake machine* kapasitas 5 ton (10 unit);
 - c. *integrated cold storage* kapasitas 100-200 ton (5 unit);
 - d. *cold storage* kapasitas 30-100 ton (14 unit) dan kapasitas 1.000 ton (1 unit);
 - e. pasar ikan modern (3 unit);
 - f. pasar ikan bersih (3 unit);
 - g. pasar ikan tradisional (3 unit);
 - h. kendaraan berpendingin (60 unit);
 - i. sentra kuliner (3 unit);
 - j. miniplant (3 unit);
 - k. gemarikan (32 mitra);
 - l. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (2 SKPT);
 - m. *marine and bussines forum* (12 kegiatan).

4. Program pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sebesar Rp813.454.764.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. operasi pengawasan di laut dengan Kapal Pengawas (selama 145 hari operasi);
 - b. operasi pengawasan melalui udara (*airborne surveillance*) (selama 100 hari operasi);
 - c. operasi pengawasan dengan *speedboat/rubber boat/rigid inflatable boat* (selama 50 hari operasi);
 - d. pembangunan kapal pengawas (1 unit);
 - e. pembangunan *speedboat* (2 unit);
 - f. bangunan/pos pengawasan yang dibangun (10 unit);
 - g. operasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara *illegal (illegal Fishing)* (4 layanan);
 - h. penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (200 kasus);
 - i. operasional pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan (BMKT, kawasan konservasi) (45 pelaku usaha);
 - j. operasional pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (obat dan pakan ikan) (411 unit usaha);
 - k. peningkatan SDM Pengawasan SDKP: PPNS Perikanan (30 orang), Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (60 orang);
 - l. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui supervisi dan monitoring Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP (1.000 kelompok).
5. Program pengelolaan ruang laut sebesar Rp666.921.318.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain :
 - a. penambahan luas kawasan konservasi (700 hektar);
 - b. pengelolaan efektif kawasan konservasi (33 kawasan);
 - c. fasilitasi lahan garam (1.200 hektar);
 - d. pembangunan sarana niaga garam (6 unit);
 - e. infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil (31 kawasan) termasuk dermaga apung di 11 lokasi;
 - f. sertifikasi hak atas tanah pulau kecil/terluar (37 pulau);
 - g. penyusunan rencana zonasi (23 provinsi);
 - h. sabuk pantai (4 lokasi), struktur *hybrid* (7 lokasi);

- i. gerakan bersih pantai (4 lokasi) dan jambore pesisir (2 lokasi);
 - j. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (4 SKPT).
6. Program riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan sebesar Rp1.785.978.817.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a. pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan (12.000 orang);
 - b. sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan (6.500 orang);
 - c. penyuluhan bagi kelompok pelaku utama/usaha (40.000 kelompok);
 - d. beasiswa dokter bahari (50 orang);
 - e. lanjutan pembangunan politeknik kelautan dan perikanan (3 unit);
 - f. data dan informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang dihasilkan (11 WPP);
 - g. data dan informasi sumberdaya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dihasilkan (6 PUD);
 - h. inovasi teknologi adaptif lokasi perikanan(4 paket);
 - i. inovasi teknologi adaptif lokasi garam (1 paket);
 - j. lanjutan pembangunan pusat riset kelautan (IAMARI 2 unit).
7. Program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebesar Rp529.775.744.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
- a. pengawasan mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya di sentra perikanan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (25 lokasi);
 - b. operasional perkarantinaan ikan (ekspor, impor, dan domestik) (154 lokasi);
 - c. operasional pengendalian mutu (12 bulan);
 - d. penanganan pelanggaran dan penegakan hukum (35 lokasi);
 - e. layanan dan pengawasan di wilayah perbatasan (30 lokasi);
 - f. standardisasi sistem manajemen mutu (pembentukan laboratorium, *reference*, uji profisiensi, validasi metode uji, akreditasi lembaga penguji dan inspeksi ISO 17020, 17025, 9001 (76 standard);
 - g. gedung, alat laboratorium, dan sarana prasarana (51 lokasi).

8. Program dukungan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kelautan dan perikanan sebesar Rp73.117.458.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. pengawasan akuntabilitas keuangan, meliputi: pengawasan perencanaan kegiatan dan anggaran, pengawasan pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa, revidi laporan keuangan, evaluasi pemanfaatan aset;
 - b. pengawasan akuntabilitas non-keuangan, meliputi: pengawasan kegiatan PSKPT, monitoring dan evaluasi rencana aksi GNP SDA sektor kelautan, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, survei efektivitas kebijakan pengawasan, pengawasan tematik mitra, koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah dan pengawas eksternal; dan
 - c. peningkatan Integritas meliputi: audit tujuan tertentu, pemantauan tindak lanjut audit investigasi, sertifikasi profesi auditor, pengendalian gratifikasi, asistensi, dan evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
9. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp423.513.361.000,00 akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain:
 - a. survei data perikanan;
 - b. layanan kepegawaian KKP;
 - c. layanan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, dan laporan keuangan KKP;
 - d. layanan perencanaan penganggaran, kinerja, dan pelaporan KKP;
 - e. layanan umum, kerumahtanggaan, arsip, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - f. layanan kerja sama dan humas;
 - g. penyusunan dan penyajian data statistik dan informasi data KKP;
 - h. pengelolaan modal bergulir usaha kelautan dan perikanan;
 - i. dukungan penyusunan laporan keuangan dan Barang Milik Negara (34 dekonsentrasi);
 - j. dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan (34 provinsi);

- k. dukungan penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan kelautan dan perikanan (34 provinsi).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/PERMEN-KP/2017

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

(JUTA RUPIAH)

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.05	Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			1.785.978,8
032.05.2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			659.213,2
032.05.2375.001	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	12.000	orang	40.000,0
032.05.2375.002	Masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi	6.500	orang	3.250,0
032.05.2375.003	Tenaga penyuluh yang melakukan penyuluhan	5.783	orang	121.414,2
032.05.2375.004	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan	40.000	kelompok	18.000,0
032.05.2375.005	Aparatur kelautan dan perikanan yang kompeten	2.860	Orang	18.880,0
032.05.2375.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	11	Layanan	17.230,0
032.05.2375.951	Layanan Internal (Overhead)	7	Layanan	3.040,0
032.05.2375.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	437.399,0
032.05.2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan			550.000,0
032.05.2376.001	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	7.943	orang	155.000,0
032.05.2376.002	Satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	18	unit	151.000,0
032.05.2376.003	Pendidikan Aparatur KKP dan masyarakat	280	orang	27.000,0
032.05.2376.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	19	Layanan	12.000,0
032.05.2376.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	205.000,0
032.05.2425	Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan			32.034,9
032.05.2425.001	Rekomendasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang dihasilkan	5	paket	1.250,0
032.05.2425.002	Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang diusulkan untuk direkomendasikan	4	paket	3.600,0
032.05.2425.003	Data dan/atau Informasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang dihasilkan	4	paket	800,0
032.05.2425.004	Sarana dan Prasarana Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	1	Paket	450,0
032.05.2425.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	2.462,6
032.05.2425.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	23.472,3
032.05.2426	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			21.895,9
032.05.2426.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP yang dihasilkan	6	paket	2.000,0
032.05.2426.002	Model Sosial Ekonomi Sektor KP yang dihasilkan	6	paket	5.500,0
032.05.2426.003	Sarana Prasarana Riset Sosial Ekonomi KP	2	paket	1.000,0
032.05.2426.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	990,7
032.05.2426.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	12.405,2
032.05.2427	Riset Perikanan			237.681,1
032.05.2427.001	Rekomendasi dan masukan Kebijakan Riset Perikanan	12	paket	3.600,0
032.05.2427.002	Data dan informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang dihasilkan	11	paket	16.500,0

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.05.2427.003	Data dan informasi sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dihasilkan	6	paket	3.600,0
032.05.2427.004	Komponen Inovasi Perikanan yang Dihasilkan	9	paket	6.485,0
032.05.2427.005	Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan	4	inovasi	3.000,0
032.05.2427.006	Sarana Prasarana Riset Perikanan	12	unit	23.729,0
032.05.2427.007	Inovasi Teknologi Perikanan yang Diusulkan untuk Direkomendasikan	4	paket	2.170,0
032.05.2427.008	Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang Dihasilkan	8	paket	2.900,1
032.05.2427.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	Layanan	10.000,0
032.05.2427.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	165.697,0
032.05.2428	Riset Kelautan			221.050,8
032.05.2428.001	Rekomendasi Kebijakan Riset Kelautan yang dihasilkan	12	paket	1.800,0
032.05.2428.002	Sentra Nelayan yang terbangun Sistem Informasi KP	80	paket	500,0
032.05.2428.003	Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya	5	kawasan	1.317,5
032.05.2428.004	Data dan informasi karakteristik dan dinamika laut yang terpetakan di WPP	2	paket	1.350,0
032.05.2428.005	Sarana Prasarana Riset Kelautan	7	unit	161.409,5
032.05.2428.006	Sarpras riset citra satelit dan radar	380	scene	9.500,0
032.05.2428.007	Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Garam	1	paket	1.000,0
032.05.2428.008	Komponen Inovasi Kelautan yang dihasilkan	3	paket	1.000,0
032.05.2428.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	Layanan	2.958,5
032.05.2428.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	40.215,3
032.05.2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP			64.102,8
032.05.2378.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	layanan	24.799,0
032.05.2378.951	Layanan Internal (Overhead)	2	Layanan	1.600,0
032.05.2378.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	37.703,8
032.06	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			1.264.959,7
032.06.2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan			606.220,9
032.06.2337.001	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan	508	unit	1.440,0
032.06.2337.002	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	5.500	orang	2.325,0
032.06.2337.003	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan sertifikasi sarana penangkapan ikan	53	RSNI	4.338,3
032.06.2337.004	Kapal perikanan yang terdaftar	15.000	unit	2.360,0
032.06.2337.005	Kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan	508	unit	501.204,5
032.06.2337.006	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	1.702	unit	1.500,0
032.06.2337.007	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan	1.702,0	unit	50.546,3
032.06.2337.008	Kapal perikanan yang operasional dan dihitung produktivitasnya	2.500	unit	1.500,0
032.06.2337.009	Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan di pelabuhan perikanan	10	lokasi	1.395,0
032.06.2337.010	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek keselamatan dan operasional	1.508	unit	25.750,0
032.06.2337.011	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Saumlaki yang mandiri	4 (terkelola)	tingkat kemandirian	10.000,0
032.06.2337.012	Ketatausahaan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	12	Bulan	1.500,0
032.06.2337.951	Layanan Internal (Overhead)	12	Layanan	1.311,7
032.06.2337.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.050,0
032.06.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			193.339,9
032.06.2338.001	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya	1	lokasi	100.000,0
032.06.2338.002	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya	80	persen	10.556,4
032.06.2338.003	Pelabuhan perikanan yang menerapkan standar internasional	1	lokasi	828,3
032.06.2338.004	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya	9	lokasi	14.311,9
032.06.2338.005	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya	75	persen	8.145,0

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.06.2338.006	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya	7	lokasi	15.103,3
032.06.2338.007	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meningkat operasionalnya	65	persen	4.665,3
032.06.2338.008	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya	9	lokasi	15.000,0
032.06.2338.009	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meningkat operasionalnya	60	persen	3.500,0
032.06.2338.010	Pelabuhan Perikanan yang diinisiasi menjadi UPT Pusat	28	pelabuhan perikanan	2.000,0
032.06.2338.011	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Merauke yang mandiri	4 (terkelola)	tingkat kemandirian	0,0
032.06.2338.012	Pelabuhan perikanan yang dikelola Provinsi yang dilakukan pembinaan	34	provinsi	3.800,0
032.06.2338.013	Ketatausahaan di Direktorat Pelabuhan Perikanan	12	Bulan	8.572,7
032.06.2338.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	5.557,1
032.06.2338.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.300,0
032.06.2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			132.402,1
032.06.2339.001	Alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia	10.300	unit	2.101,1
032.06.2339.002	Realisasi Kapal terhadap alokasi dalam SIUP	6.050	unit	5.250,0
032.06.2339.003	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	25	provinsi	15.565,0
032.06.2339.004	Nelayan yang terlindungi	500.000	orang	92.071,3
032.06.2339.005	Kredit perikanan tangkap yang difasilitasi	500	nelayan	1.500,0
032.06.2339.006	Rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha	1.100	unit	4.821,8
032.06.2339.007	Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan yang dilaksanakan	15.000	bidang	3.517,0
032.06.2339.008	Kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi	6	lokasi	3.000,0
032.06.2339.009	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelebagaannya menjadi koperasi	2.100	koperasi	2.575,9
032.06.2339.010	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	4 (terkelola)	tingkat kemandirian	0,0
032.06.2339.011	Ketatausahaan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	12	Bulan	900,0
032.06.2339.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	75,0
032.06.2339.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.025,0
032.06.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan			30.984,9
032.06.2341.001	Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya	11	WPP	2.670,0
032.06.2341.002	Laut ZEEL yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	7	WPP	5.750,0
032.06.2341.003	Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	1.450	unit	1.887,0
032.06.2341.004	Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer	250	unit	6.003,6
032.06.2341.005	Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang terbentuk	11	WPP	4.637,7
032.06.2341.006	Perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya	20	PUD	5.900,0
032.06.2341.007	Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	11	WPP	2.136,6
032.06.2341.008	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan yang mandiri	3 (terbangun)	tingkat kemandirian	0,0
032.06.2341.009	Ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	12	Bulan	900,0
032.06.2341.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	75,0
032.06.2341.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.025,0
032.06.2341	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPT			302.012,0
032.06.2341.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	layanan	50.150,0
032.06.2341.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	600,0
032.06.2341.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	251.262,0
032.07	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			944.857,6
032.07.2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan			251.688,2
032.07.2344.001	Produksi induk unggul	1.200.000	ekor	56.900,0
032.07.2344.002	Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	200; (kumulatif 1000 unit)	unit	1.200

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.07.2344.003	Rekomendasi peredaran induk unggul pasca pelepasan yang diterbitkan	-	dokumen	-
032.07.2344.004	Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	46.435.213,0	ekor	42.659,5
032.07.2344.005	Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	146.938.555,0	ekor	13.178,9
032.07.2344.006	Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	6.626.232,0	ekor	37.849,7
032.07.2344.007	Paket teknologi perekayasaan induk unggul dan benih bermutu yang dihasilkan	14	Unit	3.750,0
032.07.2344.008	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Rote Ndao yang mandiri	3 (terbangun)	tingkat kemandirian	30.000,0
032.07.2344.009	Operasional KJA Offshore	3	unit	60.000,0
032.07.2344.011	Kebun bibit rumput laut	20	paket	5.000,0
032.07.2344.012	Layanan Ketatausahaan Direktorat Perbenihan yang dilaksanakan	12	bulan	1.150,0
032.07.2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			146.747,2
032.07.2345.001	Kawasan budidaya yang dilakukan penataan	10	kawasan	33.075,0
032.07.2345.002	Paket teknologi perekayasaan sarpras dan kesehatan ikan yang dihasilkan	14	paket	3.750,0
032.07.2345.003	Kelompok masyarakat yang menerima manfaat prasarana dan sarana perikanan budidaya	500	kelompok	76.400,0
032.07.2345.004	Laboratorium yang memenuhi standar teknis	3 (kumulatif 68)	unit	500,0
032.07.2345.006	Lokasi Budidaya yang dilakukan survailan dan/atau monitoring penyakit ikannya	115,0	kab/kota	3.900,0
032.07.2345.007	Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diuji Minimal 96% Bebas Residu	5.000,0	sampel	8.500,0
032.07.2345.008	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	35,785	sampel	5.902,2
032.07.2345.009	Rehabilitasi kawasan dalam rangka upgrade kapasitas UPT pusat	12	UPT	12.000
032.07.2345.010	Layanan Ketatausahaan Direktorat Kawasan	12	bulan	2.720,0
032.07.2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			168.710,0
032.07.2346.001	Teknologi perekayasaan pembesaran ikan yang dihasilkan	14	paket	3.750,0
032.07.2346.002	Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar	2.000 (kumulatif 13.250 unit)	unit	1.900,0
032.07.2346.003	Budidaya sistem bioflok termasuk teknologi anjuran yang diterapkan oleh kelompok masyarakat	300	paket	60.000,0
032.07.2346.004	Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana	750	kelompok	45.000,0
032.07.2346.005	Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya	12.000	bidang	300,0
032.07.2346.006	Unit usaha di bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan layanan perizinannya dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan	0,0	unit	0,0
032.07.2346.007	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang mandiri	2 (Persiapan)	tingkat kemandirian	20.000,0
032.07.2346.008	Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi	5.000	hektar	3.500,0
032.07.2346.009	Kelompok pembudidaya ikan hias yang terfasilitasi	20	kelompok	1.000,0
032.07.2346.010	Lahan Minapadi yang dikembangkan	500	hektar	17.500,0
032.07.2346.011	Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya untuk alih usaha penangkap benih lobster yang dimonitoring	650,0	paket	13.990,0
032.07.2346.012	Layanan Ketatausahaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan yang Dilaksanakan	12	bulan	1.770,0
032.07.5747	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan			82.990,0
032.07.5747.001	Unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik) (kumulatif)	-	kelompok	
032.07.5747.002	Kelompok masyarakat yang menerima sarana dan prasarana bahan baku pakan ikan	250	kelompok	6.250,0
032.07.5747.003	Jenis pakan ikan yang terdaftar dan dipantau peredarannya (kumulatif)	-	jenis	
032.07.5747.004	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri	250	kelompok	20.000,0

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.07.5747.005	Kelompok masyarakat yang menerima paket bantuan budidaya pakan alami	-	kelompok	
032.07.5747.006	Paket teknologi perekayasaan bidang bahan baku, pakan dan obat ikan yang dihasilkan	10	paket	3.750,0
032.07.5747.007	Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Kota Sabang yang mandiri	2 (Persiapan)	tingkat kemandirian	12.500,0
032.07.5747.008	Pembangunan Pabrik Pakan Mandiri	2	unit	25.000,0
032.07.5747.009	Obat Ikan yang Terjamin Mutu, Keamanan dan Khasiatnya	-	jenis obat	
032.07.5747.010	Produksi Pakan Mandiri Untuk bantuan dan operasional budidaya di UPT	2.500	ton	12.500,0
032.07.2347.012	Layanan Ketatausahaan Direktorat Pakan dan Obat Ikan	12	bulan	2.990,0
032.07.2348	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			294.723,3
032.07.2348.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	55.310,2
032.07.2348.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	2.927,2
032.07.2348.994	Layanan Perkantoran	12	bulan layanan	236.485,9
032.08	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			785.003,7
032.08.2356	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan			190.39
032.08.2356.001	Pemetaan dan pemantauan logistik ikan	24	dokumen	4.209
032.08.2356.002	Regulasi tentang logistik ikan	1	dokumen	1.454
032.08.2356.003	Kerjasama dalam mendukung ketersediaan ikan	6	dokumen	1.154
032.08.2356.004	Kerjasama dalam mendukung Serapan Ikan	5	dokumen	1.152
032.08.2356.005	Prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan :	25	unit	134.335
	a. Pembangunan Cold Storage:	15	unit	109.875
	- Cold Storage 30-100 ton	14	unit	69.875
	- Cold Storage 1.000 ton	1	unit	40.000
	b. Pengadaan Ice Flake Mesin 5 Ton	10	unit	24.460
	c. Pembangunan Gudang Rumput Laut			
032.08.2356.006	Sarana logistik ikan yang disediakan dan dimanfaatkan:	40	unit	26.000
	Pengadaan Kendaraan Berpendingin	40	unit	26.000
032.08.2356.007	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Timika yang mandiri	3 (terbangun)	tingkat kemandirian	20.000
032.08.2356.951	Layanan Internal (overhead)	1	Layanan	500
032.08.2356.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.588
032.08.2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			302.52
032.08.2357.001	Menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan	68	paket	1.500
032.08.2357.002	Akses pasar produk kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor yang ditingkatkan	1	negara	4.510
032.08.2357.003	Promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional	250	juta (USD)	26.265
032.08.2357.004	Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan)	32	mitra	15.500
032.08.2357.005	Peta kebutuhan dan preferensi konsumen yang dihasilkan	1	dokumen	1.500
032.08.2357.006	Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun :	12	unit	211.995,0
	a. Pasar Ikan Bersih	3	unit	9.495
	b. Pasar ikan modern	3	unit	195.000
	c. Revitalisasi Pasar Ikan Tradisional	3	unit	3.000
	d. Sentra Kuliner	3	unit	4.500
032.08.2357.007	Peralatan Pemasaran yang Disediakan dan Dimanfaatkan	60	unit	38.377
032.08.2357.008	Kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran	1	dokumen	1.000
032.08.2357.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	500
032.08.2357.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.377
032.08.2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan			137.830,4
032.08.2358.001	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	1.700	sertifikat	8.000

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.08.2358.002	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pengolahan dan pemasaran produk hasil KP yang disusun	15	RSNI	2.000
032.08.2358.003	Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	300	unit	3.400
032.08.2358.004	Utilitas unit penanganan dan pengolahan produk hasil KP	62	persen	2.300
032.08.2358.005	Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina	25	ragam	2.455
032.08.2358.006	Sarana dan Prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan	358	unit	117.568,0
	a. Integrated Cold Storage (ICS)	5	unit	99.338,0
	b. Sarana Sistem Rantai Dingin (SRD)	300	paket	3.000,0
	b.Miniplant	3	unit	9.480,0
	c. Sarana pengolahan	50	paket	5.750,0
032.08.2358.951	Layanan Internal/Overhead	1	Layanan	500,0
032.08.2358.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.607,0
032.08.2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan			31.422,7
032.08.2360.001	Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun	12	dokumen	2.000
032.08.2360.002	Usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi	51	pelaku usaha	500
032.08.2360.003	Pelaku usaha KP yang difasilitasi pelayanan usaha dan investasinya	53	pelaku usaha	1.000
032.08.2360.004	Usaha sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan bank dan non-bank	58.000	unit usaha	4.000
032.08.2360.005	Wirausaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina	60	pelaku usaha	1.000
032.08.2360.006	Lembaga Usaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina	15	lembaga usaha	1.000
032.08.2360.007	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Biak Numfor yang mandiri	4 (terkelola)	tingkat kemandirian	20.000
032.08.2360.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	500
032.08.2360.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.423
032.08.5279	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan			33.327,2
032.08.5279.001	Ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan	4	ragam	1.515,7
032.08.5279.002	Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan	3	RSNI	198,6
032.08.5279.003	Produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	5	produk	3.000
032.08.5279.004	Data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan	225	data	652,0
032.08.5279.005	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis	9	pelaku usaha	9.354,0
032.08.5279.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	780,0
032.08.5279.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	17.826,9
032.08.2361	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PDSPKP			89.507,9
032.08.2361.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	Layanan	46.285,4
032.08.2361.001	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP pada Satker Daerah	100	%	1.190,0
032.08.2361.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	1.000,0
032.08.2361.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	41.032,5
032.09	Program Pengelolaan Ruang Laut			666.921,3
032.09.2362	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut			139.300,0
032.09.2362.001	Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat nasional dan daerah	700.000	hektar	5.000,0
032.09.2362.002	Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif	33	kawasan	53.000,0
032.09.2362.003	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan	25	kawasan	20.000,0
032.09.2362.004	Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	19	jenis	17.443,0
032.09.2362.005	Jejaring, kemitraan dan kerjasama konvensi, yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati (kumulatif)	15	jejaring/kemitraan/ kerjasama konvensi	15.357,0

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.09.2362.006	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang mandiri	4 (terkelola)	tingkat kemandirian	25.000,0
032.09.2362.015	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	2.511,9
032.09.2362.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	
032.09.2362.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	988,1
032.09.2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			156.750,0
032.09.2363.001	Lahan garam yang difasilitasi	1.200	hektar	73.800,0
032.09.2363.002	Sarana niaga garam rakyat yang dibangun	6	unit	16.200,0
032.09.2363.003	Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT	6	kawasan	7.688,4
032.09.2363.004	SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) Kab. Talaud yang mandiri	4 (terkelola)	tingkat kemandirian	52.250,0
032.09.2363.005	Fasilitasi perizinan reklamasi baik pusat maupun daerah	7	lokasi	1.000,0
032.09.2363.006	Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut	1	dokumen	1.000,0
032.09.2363.007	Pengelolaan Biofarmakologi	1	dokumen	1.000,0
032.09.2363.019	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	2.680,6
032.09.2363.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	50
032.09.2363.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	1.081
032.09.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			200.250,0
032.09.2365.001	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	31	kawasan	54.550,0
032.09.2365.002	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	4 (terkelola)	tingkat kemandirian	41.000,0
032.09.2365.003	Pulau kecil yang difasilitasi investasi dalam menunjang pengembangan ekonominya	5	pulau	1.000,0
032.09.2365.004	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) pulau kecil/terluar	37	pulau	10.000,0
032.09.2365.005	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direvitalisasi	5	komunitas	3.500,0
032.09.2365.006	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi	4	kawasan	10.300,0
032.09.2365.007	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	11	kawasan	72.050,0
032.09.2365.008	Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi	6,0	lokasi	3.150,0
032.09.2365.012	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	3.200
032.09.2365.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	
032.09.2365.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	1500,0
032.09.2366	Perencanaan Ruang Laut			31.000,
032.09.2366.001	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi	5	perairan laut	5.160,0
032.09.2366.002	Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	47	kawasan	9.800,0
032.09.2366.003	Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	23 (kumulatif 34 provinsi)	provinsi	4.850,0
032.09.2366.004	Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki dokumen	3	pulau	1.350,0
032.09.2366.005	Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1	dokumen	2.340,0
032.09.2366.006	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa) yang mandiri	2 (Persiapan)	tingkat kemandirian	4.000,0
032.09.2366.007	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	2.546,3
032.09.2366.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	
032.09.2366.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	953,7
032.09.2367	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			139.621,3
032.09.2367.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	layanan	48.592,7
032.09.2367.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	9.244,3
032.09.2367.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	81.784,3
032.10	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			813.454,8
032.10.2350	Pemantauan dan Operasi Armada			511.446,1

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.10.2350.001	Operasional kapal pengawas	145	hari	335.690,0
032.10.2350.002	Operasional pesawat patroli	100	hari	22.500,0
032.10.2350.003	Awak kapal pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi	100	orang	1.000,0
032.10.2350.004	Kapal Pengawas yang Siap Operasi	34	unit	35.000,0
032.10.2350.005	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	50	hari	27.000,0
032.10.2350.006	Perangkat sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi	1	sistem	12.000,0
032.10.2350.007	Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	1.000	kelompok	3.200,0
032.10.2350.008	Kapal Pengawas yang dibangun	1	unit	35.000,0
032.10.2350.009	Speedboat pengawas yang dibangun	2	unit	5.000,0
032.10.2350.010	Bangunan/pos pengawasan yang dibangun	10	unit	30.000,0
032.10.2350.011	Unit Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	3.400	unit usaha	500,0
032.10.2350.099	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	1.829,7
032.10.2350.951	Layanan internal/overhead	1	layanan	50,0
032.10.2350.994	Layanan perkantoran	12	bulan	2.676,4
032.10.2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan			82.444,8
032.10.2351.001	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan korporasi/pemilik yang disidik secara akuntabel	1	kasus	500,0
032.10.2351.002	Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel	200	kasus	5.950,0
032.10.2351.003	Barang Bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel	200	kasus	5.950,0
032.10.2351.004	Nelayan yang difasilitasi pemulangnya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain	100	orang	600,0
032.10.2351.005	Forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan	2	forum	450,0
032.10.2351.006	PPNS Perikanan/Aparat penegak hukum kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	30	orang	1.200,0
032.10.2351.007	Operasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal	4	layanan	65.000,0
032.10.2351.008	Data dan informasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang akuntabel	12	Data dan informasi	325,0
032.10.2351.099	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	1.195,6
032.10.2351.951	Layanan internal/overhead	1	layanan	124,0
032.10.2351.994	Layanan perkantoran	12	bulan	1.150,2
032.10.2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan			11.504,7
032.10.2352.001	Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	17	kawasan	1.869,4
032.10.2352.002	Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	14	jenis	1.056,0
032.10.2352.003	Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	45	pelaku usaha	1.800,0
032.10.2352.004	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	125	pelaku usaha	2.041,8
032.10.2352.005	Pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60	pelaku usaha	1.932,8
032.10.2352.006	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten	60	orang	800,0
032.10.2352.099	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	1.101,6
032.10.2352.951	Layanan internal/overhead	1	layanan	30,0
032.10.2352.994	Layanan perkantoran	12	bulan	873,0
032.10.2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan			12.000,2
032.10.2353.001	Kapal Perikanan yang Laik Operasional	17.052	unit	4.200,0
032.10.2353.002	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	565	unit usaha	1.500,0
032.10.2353.003	Unit Usaha Budidaya Ikan yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	411	unit usaha	2.000,0
032.10.2353.004	Usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	330	usaha	1.500,0

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.10.2353.099	Layanan Penatausahaan Direktorat	12	bulan	1.769,2
032.10.2353.951	Layanan internal/overhead	1	layanan	58,0
032.10.2353.994	Layanan perkantoran	12	bulan	973,0
032.10.2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP			196.059,0
032.10.2355.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	layanan	23.188,1
032.10.2355.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	2.699,6
032.10.2355.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	170.171,4
032.11	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			529.775,7
032.11.3987	Dukungan Manajemen			393.784,0
032.11.3987.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	layanan	37.928,8
032.11.3987.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	63.906,4
032.11.3987.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	291.948,7
032.11.3988	Karantina Ikan			55.669,6
032.11.3988.001	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan	95	persen	3.618,0
032.11.3988.002	Sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi	76	lokasi	2.856,4
032.11.3988.003	Instalasi karantina ikan yang ditetapkan	325	unit	1.377,1
032.11.3988.004	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan CKIB	210	unit	1.802,7
032.11.3988.005	Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik	12	bulan	36.560,6
032.11.3988.010	Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri	5	Dokumen	801,9
032.11.3988.015	Layanan Ketatausahaan Pusat Karantina Ikan	12	bulan	4.509,2
032.11.3988.951	Layanan Internal (Overhead)	1	layanan	2.279,7
032.11.3988.994	Layanan Perkantoran	12	bulan	1.864,0
032.11.3989	Pengendalian Mutu			36.108,0
032.11.3989.001	UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang menerapkan sistem traceability	125	UPI	887,2
032.11.3989.002	Kasus penanganan dan penolakan ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	95	persen	1.239,7
032.11.3989.003	Pengendalian mutu, kemanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya	25	lokasi	2.127,9
032.11.3989.004	Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan	12	bulan	24.616,8
032.11.3989.005	Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor	1.700	register	727,8
032.11.3989.015	Layanan Ketatausahaan Pusat Pengendalian Mutu	12	Bulan	4.430,6
032.11.3989.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	929,1
032.11.3989.994	Layanan Perkantoran (Gaji, Oprs)	12	Bulan	1.149,0
032.11.3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan			44.214,2
032.11.3990.001	Laboratorium Acuan Hama, Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (MKHP)	1	unit	5.923,3
032.11.3990.002	Kepatuhan Pelaku Usaha KP	78	persen	5.367,5
032.11.3990.003	Wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi	30	lokasi	8.104,0
032.11.3990.004	Penerapan standar sistem manajemen mutu	76	standar	15.477,1
032.11.3990.005	Operasional dan sarana waktu tunggu layanan (dwelling time)	5	lokasi	3.500,0
032.11.3990.015	Layanan Ketatausahaan Pusat Standardisasi Sistem	12	Bulan	3.146,9
032.11.3990.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	1.381,5
032.11.3990.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.314,0
032.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP			73.117,5
032.03.2331	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP			5.478,7
032.03.2331.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I	1	Laporan	5.478,7
032.03.2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP			6.092,6
032.03.2332.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II	1	Laporan	6.092,6
032.03.2333	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP			5.726,9
032.03.2333.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III	1	Laporan	5.726,9

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Alokasi Anggaran 2018		
		Target	Satuan	Alokasi
032.03.2334	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP			5.557,4
032.03.2334.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	1	Laporan	5.557,4
032.03.2335	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP			4.732,9
032.03.2335.021	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V	1	Laporan	4.732,9
032.03.2336	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KKP			45.529,0
032.03.2336.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	15.512,3
032.03.2336.951	Layanan Internal (Overhead)			930,9
032.03.2336.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	29.085,8
032.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP			423.513,4
032.01.2322	Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi			17.158,1
032.01.2322.957	Layanan Hukum	1	Layanan	12.798,9
032.01.2322.960	Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan	2.009,0
032.01.2322.961	Layanan Reformasi Birokrasi	1	Layanan	1.050,0
032.01.2322.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.300,3
032.01.2323	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur			15.070,0
032.01.2323.951	Layanan Internal	2	Layanan	526,1
032.01.2323.954	Layanan Manajemen SDM	4	Layanan	13.293,9
032.01.2323.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.250,0
032.01.2324	Pengelolaan Keuangan KKP			22.148,8
032.01.2324.951	Layanan Internal	1	Layanan	636,1
032.01.2324.955	Layanan Manajemen Keuangan	6	Layanan	20.212,7
032.01.2324.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.300,0
032.01.2325	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP			45.169,9
032.01.2325.951	Layanan Internal	1	Layanan	1.148,6
032.01.2325.952	Layanan Perencanaan	6	Layanan	42.387,0
032.01.2325.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	1.634,3
032.01.2326	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP			212.416,6
032.01.2326.951	Layanan Internal	2	Layanan	15.968,0
032.01.2326.962	Layanan Umum	4	Layanan	48.327,8
032.01.2326.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	148.120,8
032.01.2328	Pengelolaan Kerjasama KP dan Hubungan Masyarakat			37.550,0
032.01.2328.951	Layanan Internal	1	Layanan	4.613,5
032.01.2328.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1	Layanan	10.093,6
032.01.2328.964	Layanan Kerjasama Internasional	3	Layanan	19.413,2
032.01.2328.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	3.429,8
032.01.2329	Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP			56.000,0
032.01.2329.951	Layanan Internal	1	Layanan	6.566,0
032.01.2329.963	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	47.001,2
032.01.2329.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	2.432,8
032.01.5281	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan			18.000,0
032.01.5281.951	Layanan Internal	1	Layanan	1.073,4
032.01.5281.001	Layanan Pengelolaan Penyaluran Modal Usaha	5	Layanan	15.974,3
032.01.5281.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	952,3
	JUMLAH			7.287.582,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PERMEN-KP/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2018

RINCIAN KOMPONEN KEGIATAN UTAMA TAHUN 2018

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
I	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		
1	Bantuan Kapal Perikanan:	508	unit
	a. Kapal Penangkap ikan < 5 GT	300	unit
	b. Kapal penangkap ikan5 GT	100	unit
	c. Kapal penangkap ikan 20 GT	60	unit
	d. Kapal Pengangkut Ikan 28 GT	24	unit
	e. Kapal Pengangkut Ikan 60 GT	12	unit
	f. Kapal Pengangkut Ikan 120 GT (Multi Years Contract TA 2018 dan TA. 2019	6	unit
	g. Lanjutan pembangunan kapal penangkap ikan 120 GT (<i>Multi Years Contract 2017-2018</i>)	3	unit
	h. Lanjutan pembangunan kapal pengangkut ikan 100 GT (<i>Multi Years Contract 2017-2018</i>)	3	unit
2	Bantuan Mesin <10 GT	1.000	unit
3	Bantuan Alat Penangkapan Ikan	1.702	paket
4	Bengkel kapal	1	lokasi
5	Lanjutan pembangunan NFC di PPS Nizam Zachman (<i>Multi Years Contract</i>)	1	lokasi
6	Pembangunan TPI Higenis	16	lokasi
7	Bantuan Premi Asuransi Nelayan dan Kartu Nelayan (Kusuka)	500.000	orang
8	Kampung nelayan percontohan (model untuk CSR)	6	lokasi
9	Kedai nelayan (model CSR untuk BUMN)	3	lokasi
10	Sertifikasi hak atas tanah nelayan	15.000	bidang
11	Pembangunan TPI Perairan Darat	4	lokasi
12	Observer diatas kapal perikanan	600	unit
13	Partisipasi RFMO dan kerjasama perikanan tangkap internasional (CCSBT, IOTC, WCPFC, SEAFDEC, dll)	7	WPP
14	Program SKPT Saumlaki	1	lokasi
II.	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA		
1	Bantuan Benih	200.000.000	ekor
2	Produksi Induk Unggul/Calon induk unggul	1.200.000	ekor
3	Operasional Budidaya <i>Offshore</i>	3	unit
4	Produksi bibit Rumput laut	20	paket
5	Penataan kawasan budidaya:		
	a. Pembangunan embung	1	kawasan
	b. Percontohan budidaya udang	9	kawasan
6	Peralatan, mesin dan Bantuan Operasional KJA:		
	a. <i>Excavator</i>	50	unit
	b. Bantuan Operasional KJA	300	paket
7	<i>Bioflock</i>	300	unit
8	Bantuan Sarpras usaha budidaya		
	a. Masyarakat/pembudidaya	750	kelompok
	b. Alih profesi penangkap benih losbter	650	paket
	c. Bantuan Ikan hias	20	paket
9	Minapadi	500	hektar
10	Pakan Mandiri:		
	a. Bahan baku	250	paket
	b. Mesin pakan	250	Paket
	c. Pembangunan Pabrik pakan	2	unit
	d. Bantuan Pakan Ikan	2.500.000	kg

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
11	Program SKPT:		
	a. SKPT Rote Ndao	1	paket
	b. SKPT Sumba Timur	1	paket
	c. SKPT Sabang	1	paket
12	Pengujian residu produk perikanan buddidaya untuk ekspor	5.000	sampel
13	Asuransi usaha budidaya	5.000	hektar
14	Pengadaan vaksin, bahan uji, dan sarana penanganan penyakit ikan	2.500	layanan
15	Perekayasaan perikanan budidaya di UPT	15	paket
16	Perbaikan sarana produksi dan pembangunan percontohan IPAL di UPT	10	UPT
III.	DITJEN PDSPKP		
1	Cold Storage 30-100 Ton	14	unit
2	Cold Storage 1000 Ton	1	unit
3	Kendaraan berpendingin	40	unit
4	<i>Ice flake machine</i> 5 ton	10	unit
5	Promosi Gemarikan	32	mitra
6	Pasar ikan bersih	3	unit
7	Pasar ikan modern	3	unit
8	Pasar Ikan Tradisional	3	unit
9	Sentra kuliner	3	unit
10	<i>Ice Flake Machine</i> 1,5 ton	60	unit
11	Sertifikasi Kelayakan Pengolahan bagi UPI	1.700	sertifikat
12	Gudang Beku Terintegrasi	5	unit
13	Sarana Sistim Rantai Dingin	300	unit
14	Miniplant pengolahan	3	unit
12	Sarana Pengolahan bagi UMKM	50	unit
13	Promosi produk KP di pameran Internasional (nilai potensi transaksi)	250	juta (USD)
14	<i>Marine and Fisheries Business</i> Forum	12	kegiatan
15	Peta kebutuhan dan preferensi konsumen dalam negeri	1	unit
16	Program SKPT:		
	a. SKPT Timika	1	paket
	b. SKPT Biak Numfor	1	paket
IV.	DITJEN PSDKP		
1	Operasional kapal pengawas	145	hari
2	Operasional pesawat patroli	100	hari
3	Operasional <i>Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i>	50	hari
4	Operasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal	4	layanan
5	Operasional Perangkat Sistem Pemantauan SDKP (Pusdal)	1	paket
6	Operasional Pengawasan Kapal Perikanan melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan SLO (Surat Laik Operasi)	17.052	kapal
7	Pembangunan Kapal Pengawas	1	unit
8	Bangunan/Pos pengawasan yang dibangun	10	unit
9	Pembangunan <i>Speed boat</i>	2	unit
10	Pembinaan Pokmaswas	1.000	kelompok
11	Pemeliharaan kapal pengawas	34	unit
12	Operasional Penyidikan kasus dan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	200	kasus
13	Operasional pengawasan pengelolaan SDK (BMKT, kawasan konservasi)	45	pelaku usaha
14	Operasional pengawasan SDP (Obat dan pakan ikan)	411	unit usaha
V.	DITJEN PRL		
1	PUGAR	1.200	Ha
2	Pembangunan Gudang Garam (timbangan dan conveyer)	6	unit
3	Survey dan Operasional BMKT	2	paket
4	Bantuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
	a. Sarana Prasarana Wisata Bahari (Perahu Wisata, Pusat Informasi, Papan Informasi)	4	kawasan
	b. Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dermaga Apung)	11	lokasi
	c. Sarana Ekonomi Produktif untuk masyarakat PPK (Perahu Jukung, <i>Cool Box</i> , <i>Multipurpose Floating Shelter</i> , Peralatan Selam,Peralatan Pengolahan)	50	paket
	d. Pembangunan sarpras P. Lusi, Sidoarjo (Balai Pertemuan, Kantor Pengelola, Gazebo, Menara Pandang,Treking Mangrove)	1	lokasi
	e. Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) (Peralatan Selam, perahu pengawas, Etalase Souvenir, Genset, Mesin Tempel, Solar Cell Panel)	70	kelompok

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
5	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) pulau kecil dan terluar	37	pulau
6	Sabuk pantai, <i>Hybrid Engineering</i>	14	lokasi
7	Gerakan cinta laut (Bersih Pantai, Jambore Pesisir)	1	paket
8	Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (tracking mangrove, pondok informasi)	4	lokasi
9	RZ Perairan laut antarwilayah	5	kawasan
10	RZ KSN dan KSNT	47	kawasan
11	Rencana Zonasi Provinsi	23	provinsi
12	Dokumen Masterplan PPKT (Enggano, Anambas, Buton Selatan)	3	paket
13	Penyediaan Data Series (Monitoring Biofisik dan Sosek)	22	kawasan
14	Survey dan Pemetaan kawasan konservasi dalam peta laut Indonesia (kerjasama dengan pushidros)	10	kawasan
15	Pembangunan Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi (dermaga, pusat informasi, kantor pengelola, entry point, alat operasional dan monitoring)	10	KKPN
16	Survey Populasi 20 spesies biota perairan prioritas	16	satker
17	Survey potensi calon kawasan konservasi baru	10	lokasi
18	Penandaan Batas zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan kawasan konservasi	10	kawasan
19	Survey/pendataan potensi pemanfaatan berkelanjutan jenis ikan dilindungi (hiu martil, hiu koboi, hiu tikus, hiu silky, hiu falciformis, napoleon, dan bambu laut)	16	satker
20	Review rencana pengelolaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian jenis dilindungi dan kerjasama/kemitraan pengelolaan kawasan di kawasan konservasi di 33 lokasi prioritas (10 KKPN, 13 lokasi ex-coremap, 10 KKPD)	33	lokasi
21	Pembentukan kemitraan/kerjasama dan jejaring pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati (10 KKPN, 8 KKPD)	15	paket
22	Tindak lanjut keputusan/kesepakatan konvensi bidang konservasi keanekaragaman hayati (PRL selaku focal point marine biodiversity CBD)	3	konvensi
23	Operasional Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	10	KKPN
24	Penyelenggaraan <i>Our Ocean Conference (OOC)</i>	1	paket
25	Kegiatan JFPR (HLN)	1	paket
26	Program SKPT:		
	a. SKPT Mentawai	1	paket
	b. SKPT Talaud	1	paket
	c. SKPT Morotai	1	paket
	d. SKPT Moa	1	paket
VI.	BRSDM KP		
1	Pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan	12.000	orang
2	Penyuluhan kelompok pelaku utama/usaha	40.000	orang
3	Pendidikan vokasi	7.943	orang
4	Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi	4	paket
5	Model Sosial Ekonomi	6	paket
6	Inovasi Teknologi adaptif lokasi perikanan	4	paket
7	Kajian Stok Sumber daya perikanan di WPP NRI	11	WPP
8	Kajian Stok sumber daya perikanan di PUD	6	PUD
9	Inovasi teknologi adaptif lokasi garam	1	paket
10	Sistem informasi sentra nelayan	80	lokasi
11	Sarpras riset citra satelit	380	scene
12	Sertifikasi kompetensi Masyarakat kelautan dan perikanan	6.500	orang
13	BOP Tenaga penyuluh (Penyuluh PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu)	5.783	orang
14	Aparatur kelautan dan perikanan yang kompeten	2.860	orang
15	Satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar (sarpras pendidikan)	18	unit
16	Pendidikan Aparatur KKP dan masyarakat	280	orang
17	Pusat Riset Kelautan (IAMARI), Lanjutan Pembangunan (MYC)	2	unit
18	Rekomendasi Riset Kelautan dan Perikanan	35	paket
19	Inovasi Teknologi Perikanan	4	paket
20	Data dan Informasi Riset Kelautan dan Perikanan	19	paket
21	Komponen Inovasi Riset Kelautan dan Perikanan	12	paket
22	Sarpras Riset Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	27	unit

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
VIII.	BKIPM		
1	Pengawasan mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya di sentra perikanan (Inpres 1 Tahun 2017)	25	lokasi
2	Operasional perkarantinaan ikan (Satker : 47, Wilker Mandiri :107)	154	lokasi
3	Operasional pengendalian mutu (Perdin registrasi, bahan uji mutu (6 parameter), cek barang, inspeksi UPI, 86.000 Penerbitan HC)	35	lokasi
4	Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum	35	lokasi
5	Layanan dan pengawasan di wilayah perbatasan	30	lokasi
6	Standardisasi sistem manajemen mutu (pembentukan Lab Reference, Uji Profisiensi, Validasi metode uji, Akreditasi lembaga penguji dan inspeksi (ISO 17020, 17025, 9001)	76	paket
7	Gedung, Alat lab dan Sarpras UPT:		
	a. Gedung layanan ekspor, impor dan antar area	11	lokasi
	b. Alat Laboratorium	47	UPT
IX.	ITJEN		
1	Pengawasan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran di Pusat	30	kali
2	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan KKP,termasuk probity audit (34 Prov)	68	Kali
3	Reviu LK	18	Kali
4	Evaluasi Pemanfaatan Aset (34 Prov) termasuk penilaian kesesuaian bantuan pemerintah	68	Kali
5	Pengawasan Kegiatan PSKPT	12	lokasi
6	Pengawasan Pelaksanaan RB (MR, SPIP, Pelayanan Publik, SAKIP) 9 Eselon I	72	kali
7	Audit Tujuan Tertentu	30	lokasi
8	Program Pengendalian Gratifikasi (sosialisasi dan evaluasi)	22	lokasi
9	Asistensi & Evaluasi WBK/WBBM	35	lokasi
10	Audit Kinerja UPT	28	lokasi
11	Pengawasan Tematik kegiatan Mitra	23	tema
12	Pemantauan TL Hasil Pengawasan (34 Prov)	68	kali
13	Monev Rencana Aksi GNP SDA	34	lokasi
14	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi	20	lokasi
15	Koordinasi pengawasan dengan BPK/BPKP, APIP Daerah (Prov,Kab,Kota)	34	provinsi
16	Rakorwas Prov./Kab./Kota (Lokasi)	3	lokasi
17	Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI)	1	paket
18	Peningkatan Kapasitas (Sertifikasi Profesi Auditor)	60	org
19	Bimtek Pengawasan DAK Bidang KP untuk Inspektorat Prov./Kab./Kota (Prov)	24	kali
X.	SETJEN		
1	Penyiapan Produk Hukum, sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan Penataan Organisasi KKP	1	layanan
2	Pengelolaan SDM Aparatur KKP	1	layanan
3	Pengelolaan Keuangan KKP dan PNPB	1	layanan
4	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Monev, Kinerja dan Pelaporan KKP	1	layanan
5	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	1	layanan
6	Pengelolaan Kerjasama Internasional, Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	1	layanan
7	Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP, termasuk pelaksanaan One Data KKP dan survey data perikanan	1	layanan
8	Operasional Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1	layanan
9	Kegiatan Dekonsentrasi yang Dilimpahkan ke Provinsi	34	provinsi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

